**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




# DIKOTOMI ANTARA PERSEPSI SOSIAL YANG TERKONSTRUKSI DAN REALITAS EKONOMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

**Claudia Widiastuti Mo'i[1], Maria Meliarni Bunga[2], Maria Yosefina Surat[3], Patermus K. T. A. Bala Langobelen[4], Cicilia Dwi Dalin Naben[5], Avensius Tumur[6], Kaisar Josep Juan[7], Lasarus Jehamat[8], Petrus Selestinus Mite[9]**

[123456789] Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

dewimoi202@gmail.com,
2004meliarnibunga@gmail.com,
yosefinasurat39@gmail.com,
tryandkal@gmail.com,
ciciliadwydalinn@gmail.com,
avensiustumur@gmail.com,
kaisaryoseph@gmail.com,
lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id,
petrus_mite@staf.undana.ac.id

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dikotomi antara persepsi sosial yang terbentuk dalam masyarakat mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan realitas ekonomi yang secara faktual dialami oleh PNS, khususnya pada level golongan rendah. Persepsi mengenai kemapanan ekonomi PNS telah berkembang menjadi konstruksi sosial yang kuat melalui reproduksi budaya, narasi historis, simbol birokrasi, serta representasi media. Sementara itu, realitas ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar PNS menghadapi tekanan finansial berupa keterbatasan pendapatan, tingginya biaya hidup, dan tuntutan sosial masyarakat yang menempatkan mereka sebagai kelompok ekonomi stabil. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah teori konstruksi sosial, teori peran sosial, dan teori labeling, serta merangkum hasil 15 penelitian terdahulu terkait persepsi publik dan kondisi kesejahteraan PNS. Hasil sintesis menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara persepsi publik dan kondisi ekonomi riil, yang dipengaruhi oleh kuatnya stereotip sosial dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap struktur penghasilan PNS. Penelitian ini menegaskan bahwa dikotomi tersebut berdampak pada tekanan sosial, psikologis, dan ekonomi bagi PNS serta mengindikasikan perlunya edukasi publik dan pembenahan kebijakan yang lebih akurat dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan PNS. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai konstruksi sosial profesi dan dinamika kesejahteraan aparatur negara.

**Kata Kunci**: PNS, konstruksi sosial, persepsi sosial, realitas ekonomi, peran sosial, labeling

***A B S T R A C T***

*This study aims to examine the dichotomy between the social perceptions formed in society regarding Civil Servants (PNS) and the economic reality experienced by PNS, especially at the lower levels. The perception of PNS economic stability has developed into a strong social construct through cultural reproduction, historical narratives, bureaucratic symbols, and media representation. Meanwhile, economic reality shows that most PNS face financial pressures in the form of limited income, high living costs, and social demands from society that place them in a stable economic group. This study uses a literature review method, examining social construction theory, social role theory, and labeling theory, and summarizes the results of 15 previous studies related to public perception and the welfare of civil servants. The synthesis reveals a consistent gap between public perception and real economic conditions, influenced by strong social stereotypes and a weak public understanding of the civil servant income*

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




*structure. This study confirms that this dichotomy impacts social, psychological, and economic pressures on civil servants and indicates the need for public education and policy reforms that more accurately depict the welfare of civil servants. These findings are expected to serve as a reference for further research on the social construction of the profession and the dynamics of civil servant welfare*

***Keywords**: Civil servants, social construction, social perception, economic reality, social role, labeling*

## 1. PENDAHULUAN

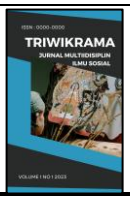
Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati posisi simbolik yang sangat kuat dalam imajinasi sosial masyarakat Indonesia. Sejak masa Orde Baru, PNS telah dipersepsikan sebagai pekerjaan yang stabil, aman, dan menjanjikan jaminan sosial yang lebih baik dibandingkan profesi lainnya. Posisi simbolik ini bukanlah sesuatu yang hadir secara natural, tetapi merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses historis, kebijakan negara, serta reproduksi narasi di tingkat keluarga dan komunitas (Rinaldi, 2020; Suryadi, 2018). Dalam banyak kasus, orang tua mendorong anak-anaknya menjadi PNS karena profesi tersebut dipandang sebagai simbol kepastian hidup. Media massa turut memperkuat citra tersebut melalui pemberitaan yang menampilkan PNS sebagai aktor birokrasi yang menikmati fasilitas, keamanan kerja, dan kemapanan finansial (Umar, 2020).

Konstruksi sosial tersebut pada akhirnya melahirkan persepsi publik yang mengaitkan PNS dengan kestabilan ekonomi. Masyarakat sering menganggap bahwa PNS selalu memiliki pendapatan tetap, tunjangan memadai, serta jalur karier yang jelas sehingga profesi ini kemudian diasosiasikan dengan kelas menengah mapan (Latif & Rahmawati, 2019; Dewi, 2021). Dalam lingkungan sosial, identitas sebagai PNS bahkan menjadi standar penilaian status seseorang. Namun, persepsi ini kerap berada pada dimensi simbolik yang tidak seluruhnya mencerminkan realitas ekonomi faktual. Sebagian besar persepsi ini terbentuk oleh stereotip historis, narasi turun-temurun, dan informasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman struktural mengenai sistem remunerasi ASN di Indonesia.

Realitas ekonomi yang dialami oleh PNS di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Struktur penggajian PNS bersifat hierarkis, ketat, dan sangat bergantung pada golongan, masa kerja, serta kemampuan fiskal daerah. Penelitian Wulandari (2020) di daerah Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa PNS golongan II dan III sering kali menghadapi tekanan finansial yang signifikan akibat biaya hidup tinggi yang tidak sebanding dengan gaji pokok maupun tunjangan. Mandala (2022) dari IPDN pun menegaskan bahwa terdapat kesenjangan besar antara tunjangan PNS pusat, provinsi kaya, dan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Banyak PNS kemudian mencari penghasilan tambahan atau bergantung pada pendapatan pasangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Putri, 2021). Dengan demikian, terdapat jarak yang jelas antara persepsi publik tentang kemapanan ekonomi PNS dan kondisi riil yang dialami sebagian besar pegawainya.

Fenomena dikotomi ini menjadi isu penting dalam kajian sosiologi modern. Pada satu sisi, konstruksi sosial membentuk realitas simbolik tentang PNS sebagai kelas menengah mapan. Pada sisi lain, kondisi ekonomi struktural menunjukkan ketidaksinkronan antara makna sosial dan realitas material. Perbedaan antara “apa yang dipikirkan masyarakat” dan “apa yang benar-benar dialami PNS” menciptakan misperception gap yang berdampak pada tekanan sosial, tuntutan gaya hidup, hingga beban psikologis bagi PNS itu sendiri (Firmansyah, 2021; Johansyah, 2023).

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat membentuk makna terhadap profesi melalui simbol dan narasi, bukan berdasarkan kondisi ekonomi yang objektif.

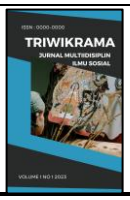
Berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi sosial masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai profesi yang stabil dan mapan dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh banyak PNS, khususnya pada golongan rendah dan di daerah. Suryadi (2018) mengungkap bahwa konstruksi sosial tentang kemapanan PNS tidak sejalan dengan kondisi finansial nyata PNS golongan II dan III, sementara Latif dan Rahmawati (2019) menemukan bahwa penghasilan dasar PNS daerah sering kali tidak mencukupi sehingga mendorong mereka mencari pekerjaan sampingan. Umar (2020) menegaskan bahwa media sosial justru mereproduksi stereotip kemapanan PNS melalui simbol-simbol formal, meskipun realitas ekonominya beragam. Wulandari (2020) dan Rinaldi (2020) menunjukkan bahwa PNS di daerah tertinggal menghadapi beban kerja tinggi dengan kesejahteraan rendah, namun citra historis PNS sebagai kelompok elite tetap bertahan. Indrawan (2021) menambahkan bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi sosial, sedangkan Putri (2021), Firmansyah (2021), dan Dewi (2021) menegaskan bahwa tuntutan sosial, simbol profesi, dan narasi kolektif masyarakat mendorong PNS untuk tampak mapan, meskipun kondisi ekonomi aktual mereka tidak selalu demikian.

Secara umum, penelitian terdahulu mengenai persepsi publik terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah banyak membahas stereotip kemapanan, representasi media, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, serta tekanan sosial yang dialami PNS, namun sebagian besar masih berfokus pada konstruksi sosial pada level makro tanpa mengaitkannya secara langsung dengan proses terbentuknya kesenjangan persepsi dalam interaksi sosial sehari-hari. Meskipun beberapa studi menyoroti kondisi kesejahteraan riil PNS, kajian tersebut umumnya belum terintegrasi dengan analisis tentang bagaimana persepsi publik yang keliru terbentuk, direproduksi, dan dialami secara personal oleh PNS, khususnya dari golongan rendah atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian berupa kebutuhan akan kajian yang menghubungkan secara komprehensif konstruksi sosial masyarakat, persepsi publik, dan realitas ekonomi PNS pada level mikro, termasuk bagaimana ekspektasi sosial, beban simbolik, dan representasi digital membentuk tekanan psikososial serta memengaruhi relasi sosial dan gaya hidup PNS, yang dalam konteks ini diisi oleh penelitian melalui analisis literatur berbasis teori konstruksi sosial, teori peran sosial, dan teori labeling.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) bagaimana konstruksi sosial masyarakat Indonesia membentuk persepsi kolektif mengenai kemapanan PNS? (2) bagaimana realitas ekonomi PNS sesungguhnya berdasarkan struktur penghasilan, biaya hidup, serta kondisi ekonomi yang bervariasi antarwilayah? (3) sejauh mana kesenjangan antara persepsi publik dan realitas ekonomi tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan psikologis PNS?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif konstruksi persepsi sosial tentang PNS serta menganalisis kondisi ekonomi faktual yang dialami PNS, termasuk kesenjangan yang muncul di antara keduanya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi pola dan faktor sosial yang memperkuat atau melemahkan konstruksi tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi profesi, konstruksi sosial, dan studi birokrasi, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki pemahaman publik tentang kondisi kesejahteraan PNS, serta mendorong kebijakan remunerasi yang lebih adil dan kontekstual di Indonesia (Magor et al., 2024; Syahrul & Kibtiyah, 2020).

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial tidak muncul secara alamiah, tetapi dibangun melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus. Realitas terbentuk melalui tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, masyarakat mengekspresikan pemikiran, pengalaman, serta nilai-nilai mereka tentang suatu kelompok ke dalam dunia sosial. Ekspresi tersebut kemudian berkembang menjadi kenyataan objektif melalui proses objektivasi, yaitu ketika masyarakat menerima dan mengakui pandangan itu sebagai kebenaran yang berlaku umum. Tahap terakhir adalah internalisasi, ketika individu menyerap pemahaman tersebut dan menjadikannya bagian dari cara pandang mereka terhadap dunia.

Dalam konteks persepsi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), teori konstruksi sosial menjelaskan bagaimana masyarakat membangun gambaran tentang PNS sebagai profesi yang stabil, sejahtera, dan penuh jaminan hidup. Narasi ini tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui warisan historis birokrasi Indonesia, pengalaman generasi sebelumnya, serta penguatan oleh media massa. Seragam, jabatan struktural, dan status sebagai "pegawai pemerintah" menjadi simbol yang memperkuat konstruksi bahwa PNS adalah kelompok yang mapan. Meskipun realitas ekonomi sebagian PNS menunjukkan kondisi yang jauh dari gambaran tersebut, konstruksi sosial tetap bertahan karena masyarakat telah menganggapnya sebagai kebenaran umum. Dengan demikian, teori ini membantu memetakan bagaimana persepsi kolektif dibangun dan dipertahankan, serta mengapa ia sering bertentangan dengan kondisi ekonomi faktual PNS.

### Teori Peran Sosial

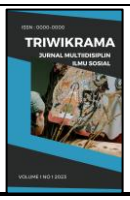
Teori peran sosial, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Eagly dan Wood (2012), menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat menempati peran tertentu yang diikuti oleh seperangkat norma, ekspektasi, dan tanggung jawab. Peran sosial tidak hanya menggambarkan apa yang seseorang lakukan, tetapi juga bagaimana masyarakat mengharapkan individu tersebut bersikap dan tampil. Ekspektasi ini sering kali menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh kelompok tertentu, terlepas dari kondisi nyata yang mereka alami.

Dalam profesi PNS, peran sosial berperan besar dalam membentuk cara masyarakat memandang dan memperlakukan mereka. Sebagai "abdi negara", PNS dipersepsikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral, kemampuan ekonomi stabil, dan kehidupan yang terjamin. Masyarakat sering mengharapkan PNS untuk tampil profesional, tidak mengeluhkan pendapatan, serta siap berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan adat. Ekspektasi tersebut lahir dari peran sosial yang dilekatkan pada profesi PNS, bukan dari kondisi ekonomi riil yang mereka hadapi. Banyak PNS golongan II dan III yang harus mengelola pendapatan minim, menghadapi kenaikan biaya hidup, serta menanggung beban keluarga besar, namun tetap dituntut memenuhi peran sosial sebagai kelompok "berdaya". Teori peran sosial membantu menjelaskan bagaimana ekspektasi ini muncul, bertahan, dan menciptakan kesenjangan antara peran ideal dan realitas kehidupan PNS.

### Teori Labeling

Teori labeling yang dikembangkan oleh Howard Becker (1963) menekankan bahwa identitas seseorang atau kelompok tidak hanya ditentukan oleh perilaku mereka, tetapi juga oleh label atau cap yang diberikan masyarakat. Ketika sebuah label telah dilekatkan, masyarakat akan menilai, memperlakukan, dan berinteraksi dengan individu atau kelompok tersebut berdasarkan label itu. Label sosial sering kali menghasilkan stereotip yang kuat dan sulit diubah, bahkan jika kondisi yang sebenarnya tidak mendukung label tersebut.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Dalam konteks PNS, masyarakat melabeli mereka sebagai kelompok yang "mapan", "stabil secara ekonomi", dan "lebih sejahtera daripada masyarakat umum". Label ini kemudian menjadi lensa yang digunakan masyarakat untuk memahami seluruh aspek kehidupan PNS, termasuk kemampuan finansial mereka. Label tersebut juga memunculkan tuntutan sosial, seperti kewajiban untuk memberi sumbangan dalam kegiatan adat, menjadi pihak yang "selalu siap membantu", atau diasumsikan mampu memenuhi kebutuhan keluarga besar. Padahal, banyak PNS justru berada pada situasi rentan secara ekonomi karena tingginya biaya hidup dan keterbatasan struktur gaji. Labeling inilah yang membuat masyarakat mengabaikan realitas empiris, sehingga memperkuat kesenjangan antara persepsi dan kenyataan. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana label sosial membatasi pemahaman publik dan mengendalikan cara PNS dinilai dalam kehidupan sehari-hari.

## Persepsi Sosial tentang PNS

Persepsi sosial tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merujuk pada penilaian, gambaran, dan citra kolektif masyarakat terhadap profesi birokrat sebagai bagian dari aparatur negara. Persepsi ini tidak lahir secara spontan, tetapi merupakan hasil konstruksi panjang yang terbentuk melalui sejarah birokrasi, pengalaman sosial masyarakat, serta representasi PNS dalam ruang publik. Dalam banyak konteks, PNS sering dipersepsikan sebagai kelompok yang stabil secara ekonomi, memiliki pekerjaan yang aman, dan menikmati fasilitas negara yang relatif lebih baik dibandingkan sektor pekerjaan lainnya. Citra ideal tersebut sejalan dengan temuan Fadillah (2021) yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap PNS sebagai simbol kestabilan, keterjaminan masa depan, dan status sosial yang prestisius. Hal itu membuat profesi PNS tetap menjadi pekerjaan yang sangat diminati, khususnya di kalangan kelas menengah.

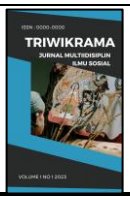
Akan tetapi, persepsi tersebut sering kali tidak mencerminkan kondisi empirik yang dialami oleh sebagian besar PNS. Penelitian Wijaya (2023) menunjukkan bahwa persepsi tentang PNS sebagai kelompok "mapan dan sejahtera" lebih banyak dibentuk oleh narasi lama tentang birokrasi yang berakar sejak era Orde Baru, ketika profesi PNS dianggap sebagai sumber kepastian ekonomi. Narasi ini bertahan hingga saat ini karena diperkuat oleh pengalaman keluarga, media, serta pembicaraan sosial yang diwariskan antar generasi. Dengan demikian, persepsi sosial mengenai PNS harus dipahami sebagai gambaran yang tidak selalu berkaitan dengan realitas ekonominya, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi.

Selain itu, persepsi sosial mengenai PNS juga dipengaruhi oleh stereotip negatif yang melekat pada profesi ini, seperti anggapan "kerja santai", "jam kerja pendek", atau "banyak fasilitas negara". Menurut penelitian Herlina (2022), stereotip ini sering dilekatkan secara general tanpa mempertimbangkan beban kerja yang berbeda antar instansi atau wilayah, sehingga menghasilkan persepsi tunggal yang tidak mencerminkan kompleksitas birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi sosial PNS berada dalam ketegangan antara citra ideal dan stereotip negatif, yang keduanya tidak selalu sesuai dengan realitas empiris.

## Konstruksi Sosial terhadap Profesi PNS

Konstruksi sosial terhadap PNS merujuk pada bagaimana makna, citra, dan nilai tentang profesi PNS dibentuk melalui proses interaksi sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Mengacu pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan Berger dan Luckmann, kenyataan sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks profesi PNS, konstruksi ini terjadi ketika masyarakat menciptakan narasi tertentu mengenai PNS (eksternalisasi), narasi

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com




tersebut diterima sebagai "kebenaran umum" (objektivasi), lalu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk realitas sosial yang dianggap permanen (internalisasi).

Narasi tentang PNS sebagai "pekerjaan aman dan terhormat" merupakan salah satu hasil konstruksi sosial yang paling kuat di Indonesia. Menurut kajian Rahmawati (2024), citra ini tidak hanya muncul karena status formal PNS sebagai aparatur negara, tetapi juga berkaitan dengan struktur masyarakat yang menghormati pekerjaan yang dianggap memiliki kedekatan dengan pemerintah. Representasi ini diperkuat dalam berbagai praktik sosial, seperti kebiasaan orang tua mendorong anaknya menjadi PNS, atau pandangan bahwa status PNS meningkatkan nilai sosial seseorang dalam komunitasnya.

Konstruksi sosial ini juga diperkuat oleh representasi media dan pengalaman kolektif. Penelitian Setyawan (2023) menunjukkan bahwa pemberitaan media sering menggambarkan PNS dalam dua wajah: sebagai profesi stabil dengan gaji dan tunjangan tetap, namun sekaligus sebagai kelompok yang kerap dianggap tidak efisien. Akibatnya, masyarakat membentuk citra yang paradoksal terhadap PNS: stabil tetapi lamban, aman tetapi kurang produktif. Pola konstruksi ini menunjukkan bahwa realitas tentang PNS tidak terbentuk dari data ekonomi aktual, tetapi dari tafsir sosial yang terus direproduksi oleh pengalaman dan diskursus publik.

Dengan demikian, konstruksi sosial mengenai PNS tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang sesuai konteks sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan sistem gaji, reformasi birokrasi, hingga digitalisasi layanan publik telah menggeser sebagian pandangan masyarakat, meski konstruksi lama masih tetap bertahan. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat sering tidak sinkron dengan realitas ekonomi PNS yang sesungguhnya.

**Realitas Ekonomi PNS**

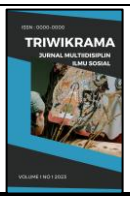
Realitas ekonomi PNS menggambarkan kondisi pendapatan, pengeluaran, kesejahteraan, dan kemampuan ekonomis yang dimiliki PNS berdasarkan data empirik, regulasi, dan kondisi faktual di lapangan. Realitas ini berbeda-beda berdasarkan golongan, masa kerja, lokasi penugasan, dan beban kerja. Menurut laporan KemenPAN-RB (2024), mayoritas PNS golongan I dan II masih berada pada tingkat pendapatan yang relatif rendah dan kurang memadai untuk standar kebutuhan keluarga modern, khususnya di kota besar. Artinya, citra "sejahtera dan mapan" tidak berlaku merata bagi seluruh PNS.

Penelitian Lestari dan Putra (2023) menunjukkan bahwa banyak PNS golongan rendah harus melakukan pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama pada daerah dengan biaya hidup tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara persepsi masyarakat yang menganggap PNS selalu berada dalam kondisi ekonomi stabil, dengan realitas bahwa sebagian dari mereka berada pada kondisi ekonomi pas-pasan. Kondisi ini terutama dialami oleh PNS baru dengan golongan awal, yang memiliki beban pengeluaran lebih besar daripada pendapatan awal mereka.

Selain itu, realitas ekonomi PNS juga dipengaruhi oleh struktur tunjangan kinerja yang berbeda antar instansi. Penelitian oleh Prabowo (2022) menemukan bahwa ketimpangan tunjangan antar lembaga menyebabkan ketidaksamaan kesejahteraan yang cukup signifikan, sehingga realitas ekonomi PNS tidak dapat digeneralisasi. PNS pada kementerian tertentu dapat memiliki penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan PNS pada instansi lain meski memiliki pangkat dan masa kerja yang sama. Perbedaan ini semakin memperjelas bahwa realitas ekonomi PNS bersifat variatif dan tidak dapat disederhanakan dalam satu persepsi tunggal.

Faktor eksternal seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta dinamika ekonomi nasional juga sangat memengaruhi kondisi kesejahteraan PNS. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi berdampak langsung pada daya beli PNS, terutama golongan rendah.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Artinya, meskipun secara formal gaji PNS diatur oleh negara, realitas ekonomi mereka tetap bergantung pada dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas.

**Dikotomi antara Persepsi dan Realitas Ekonomi PNS**

Dikotomi antara persepsi sosial dan realitas ekonomi PNS merujuk pada jarak, perbedaan, atau ketidaksesuaian antara gambaran kolektif masyarakat tentang PNS dengan kondisi ekonomi faktual yang dialami oleh PNS itu sendiri. Dikotomi ini muncul karena masyarakat membangun persepsi berdasarkan narasi historis, pengalaman sosial, dan konstruksi budaya, sementara realitas ekonomi PNS dipengaruhi oleh regulasi, kondisi ekonomi makro, dan variasi struktural dalam birokrasi.

Penelitian Anggraini (2023) menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang citra PNS sebagai pekerjaan yang memberikan kenyamanan finansial dan status sosial tinggi. Namun, temuan tersebut bertolak belakang dengan data empiris yang menunjukkan bahwa kesejahteraan PNS sangat bergantung pada golongan, instansi, dan daerah penugasan. Sementara itu, Kurniawan (2024) menegaskan bahwa dikotomi ini membuat sebagian besar masyarakat memiliki harapan yang tidak realistis terhadap kesejahteraan PNS, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dalam menilai kondisi ekonomi mereka.

Dikotomi ini bukan sekadar perbedaan persepsi, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus menerus direproduksi. Realitas ekonomi PNS, terutama bagi PNS golongan rendah, sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak dari mereka yang menghadapi tantangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap fasilitas tertentu, dan beban hidup yang tinggi. Namun, persepsi masyarakat tetap cenderung melihat PNS sebagai kelompok sejahtera dan nyaman, sehingga terjadi jurang antara persepsi dan kenyataan.

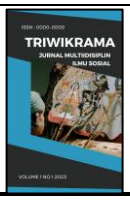
Dengan demikian, konsep dikotomi ini menjadi tema utama dalam penelitian karena menggambarkan ketidakseimbangan antara konstruksi sosial dan data ekonomi. Pemahaman terhadap dikotomi ini penting untuk melihat bagaimana masyarakat menafsirkan profesi PNS, serta bagaimana kebijakan publik dan literatur ilmiah dapat membantu menyelaraskan persepsi dengan realitas faktual.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dengan sifat kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sangat sesuai untuk menelusuri bagaimana dikotomi antara persepsi sosial yang terkontruksi dan realitas ekonomi PNS dibahas dalam hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori sosiologi, laporan kebijakan, serta tulisan ilmiah yang berkembang dalam konteks administrasi publik. Metode ini juga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, kesenjangan riset, dan dinamika sosial yang membentuk konstruksi masyarakat terhadap profesi PNS tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan.

Dalam penelitian studi literatur, sumber data utama diperoleh melalui penelusuran sistematis dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks teori sosial, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah, data BPS, dan laporan kebijakan ASN. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai platform akademik seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, ResearchGate, dan repositori

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com




universitas seperti UI, UGM, UNPAD, UNDIP, UB, UNS, dan lainnya. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu memilih literatur yang relevan secara langsung dengan topik mengenai persepsi sosial, konstruksi sosial, kesejahteraan PNS, citra ASN, hingga faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kehidupan PNS.

Untuk memastikan fokus penelitian tetap terarah, literatur yang digunakan dalam studi ini memenuhi kriteria inklusi tertentu, antara lain: (1) membahas profesi PNS atau persepsi publik mengenai PNS; (2) mengulas teori konstruksi sosial khususnya Berger & Luckmann, dan teori pendukung teori peran social Eagly dan Wood, teori labeling Howard Becker ; (3) memuat data empiris mengenai kesejahteraan, pendapatan, tunjangan, atau kondisi ekonomi PNS; (4) diterbitkan pada rentang tahun 2015–2024 agar tetap kontekstual; dan (5) berasal dari sumber terpercaya seperti jurnal terakreditasi, laporan kebijakan resmi, atau karya akademik universitas. Sementara itu, literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari analisis.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring mencari inti informasi dari setiap literatur, menandai bagian yang berhubungan dengan persepsi sosial PNS, representasi media, serta realitas ekonomi seperti gaji, tunjangan, dan beban hidup sehari-hari. Kemudian, informasi tersebut disajikan secara tematik dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema seperti: persepsi publik dan konstruksi sosial tentang PNS, kondisi ekonomi dan kesejahteraan PNS, representasi media, hingga dikotomi antara harapan sosial dan fakta empiris. Pengelompokan ini memungkinkan peneliti melihat pola-pola keterhubungan antar-literatur sehingga muncul pemahaman yang lebih mendalam.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan berkelanjutan selama proses analisis berlangsung. Kesimpulan tidak ditarik secara langsung, tetapi melalui proses interpretasi mendalam terhadap temuan-temuan literatur yang menunjukkan adanya jurang antara persepsi sosial tentang kemapanan PNS dan realitas ekonomi yang sering kali berbeda jauh dari bayangan masyarakat. Dalam penelitian literatur, validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari disiplin ilmu berbeda sosiologi, administrasi publik, kebijakan publik, ekonomi, dan kajian media agar pemahaman yang diperoleh bersifat komprehensif dan tidak bias pada satu jenis perspektif saja.

Dengan demikian, metode studi literatur dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai strategi analisis yang memungkinkan peneliti mengkonstruksi gambaran menyeluruh mengenai bagaimana persepsi sosial terhadap PNS terbentuk, direproduksi, dan dipertentangkan dengan realitas ekonomi yang dialami oleh PNS di berbagai konteks. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam dan dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris pada masa mendatang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

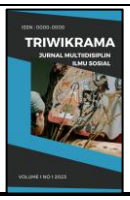
### HASIL

### Konstruksi Sosial Masyarakat tentang Kemapanan PNS

Berdasarkan sintesis dari berbagai literatur yang telah dikaji, ditemukan bahwa persepsi masyarakat Indonesia mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai kelompok yang mapan secara ekonomi merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Konstruksi ini dibentuk melalui tiga mekanisme utama:

a) Reproduksi Narasi Historis: Narasi ini berakar sejak era Orde Baru, di mana PNS dijadikan pilar stabilitas dan diberikan berbagai fasilitas, menjadikannya simbol kemapanan. Suryadi

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




(2018) menemukan narasi ini sangat kuat tertanam dalam budaya keluarga dan menjadi tolok ukur kesuksesan.

b) Simbol dan Atribut Birokrasi: Atribut seperti seragam dinas, kartu identitas, dan jabatan struktural berfungsi sebagai penanda visual yang memperkuat citra kemapanan dan status sosial yang tinggi, bahkan di lingkungan perdesaan (Dewi, 2021).
c) Representasi Media: Media massa dan media sosial melanggengkan konstruksi ini melalui konten yang menampilkan kehidupan PNS secara teratur, stabil, dan sejahtera, terlepas dari kondisi aktualnya (Umar, 2020).

Proses ini sejalan dengan teori Berger dan Luckmann (1966) melalui tahapan eksternalisasi (pandangan diekspresikan), objektivasi (pandangan diterima sebagai kebenaran umum), dan internalisasi (pandangan diserap sebagai cara pandang permanen), yang membuat konstruksi sosial tentang kemapanan PNS tetap bertahan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai kemapanan PNS tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam banyak komunitas, status sebagai PNS secara otomatis menempatkan individu pada posisi sosial tertentu yang diasosiasikan dengan otoritas, kemampuan ekonomi, dan stabilitas hidup. Hal ini tampak dari pola interaksi sosial di lingkungan masyarakat, di mana PNS sering dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan komunitas, dipercaya memegang peran kepanitiaan, atau dianggap memiliki kapasitas finansial untuk berkontribusi lebih besar dibandingkan warga lain.Selain itu, konstruksi sosial ini juga diperkuat melalui mekanisme sosial informal seperti percakapan sehari-hari, candaan sosial, dan ungkapan-ungkapan normatif yang beredar di masyarakat. Ungkapan seperti “kan kamu PNS” atau “masa PNS tidak mampu” mencerminkan bagaimana kemapanan ekonomi telah dilekatkan sebagai identitas inheren pada profesi tersebut. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, bentuk-bentuk ekspresi ini merupakan manifestasi konkret dari objektivasi realitas sosial, di mana konstruksi tentang PNS mapan telah menjadi pengetahuan bersama yang jarang dipertanyakan.

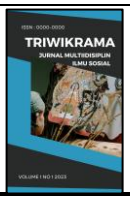
Lebih jauh, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa konstruksi ini bersifat lintas generasi. Persepsi tentang PNS sebagai profesi mapan diwariskan melalui keluarga, terutama oleh orang tua yang mengalami masa ketika PNS memiliki posisi istimewa dalam struktur sosial-ekonomi. Suryadi (2018) menegaskan bahwa dalam budaya keluarga Jawa, profesi PNS sering diposisikan sebagai simbol keberhasilan hidup, sehingga anak-anak diarahkan untuk mengejar status tersebut tanpa mempertimbangkan perubahan konteks ekonomi yang terjadi saat ini. Proses pewarisan inilah yang membuat konstruksi sosial tentang PNS relatif tahan terhadap perubahan struktural yang sebenarnya telah menggerus kesejahteraan sebagian PNS.Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial kemapanan PNS tidak berdiri sebagai persepsi individual semata, melainkan sebagai realitas kolektif yang diproduksi dan direproduksi melalui sistem simbol, bahasa, praktik sosial, serta memori historis masyarakat. Kekuatan konstruksi inilah yang menjelaskan mengapa persepsi tersebut tetap dominan meskipun data empiris menunjukkan kondisi ekonomi PNS yang sangat beragam dan dalam banyak kasus jauh dari kata mapan.

**Realitas Ekonomi PNS Berdasarkan Data Empiris**

Berbeda dengan persepsi publik, realitas ekonomi PNS di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor struktural, di mana mayoritas PNS, khususnya golongan I, II, dan III, menghadapi tantangan ekonomi signifikan.

a) Kesenjangan Tunjangan Antarinstansi: Prabowo (2022) menemukan ketimpangan tunjangan kinerja yang sangat mencolok. PNS di instansi "basah" (seperti Kementerian Keuangan)

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com




dapat menerima tunjangan hingga 10-15 kali lipat lebih besar dibandingkan PNS di instansi lain (seperti Kementerian Pendidikan) dengan pangkat dan masa kerja yang sama.

b) Keterbatasan Fiskal Daerah: PNS di daerah tertinggal menghadapi beban kerja berat dengan tunjangan minim akibat keterbatasan fiskal daerah. Wulandari (2020) mencontohkan kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT) di mana tunjangan jauh lebih rendah, bahkan memaksa PNS menanggung biaya operasional dinas pribadi.
c) Kebutuhan Mencari Pekerjaan Sampingan: Latif dan Rahmawati (2019) membuktikan bahwa banyak PNS golongan rendah terpaksa mencari pekerjaan sampingan (berjualan online, guru les) karena gaji pokok dan tunjangan yang diterima tidak mencukupi standar hidup layak, terutama di kota besar.
d) Dampak Inflasi dan Biaya Hidup Tinggi: Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok (Data BPS, 2023) memperburuk kondisi PNS golongan awal dengan gaji pokok di bawah Rp 3 juta. Lestari dan Putra (2023) menambahkan bahwa PNS baru di kota besar dapat menghabiskan lebih dari 50% penghasilan hanya untuk biaya sewa dan transportasi.

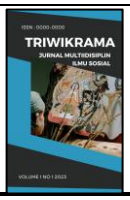
Hasil sintesis literatur juga memperlihatkan bahwa realitas ekonomi PNS tidak dapat dipahami secara tunggal atau seragam. Perbedaan golongan, masa kerja, wilayah penugasan, serta jenis instansi menciptakan stratifikasi kesejahteraan yang tajam di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa status sebagai PNS tidak otomatis menjamin keamanan ekonomi sebagaimana yang diyakini masyarakat secara umum.Dalam banyak kasus, PNS golongan awal menghadapi situasi ekonomi yang rentan, terutama pada tahun-tahun pertama masa kerja. Literatur menunjukkan bahwa pendapatan awal PNS sering kali belum mampu mengimbangi tuntutan hidup modern, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak PNS baru berada pada fase kehidupan yang membutuhkan biaya besar, seperti membangun rumah tangga, membiayai pendidikan anak, dan membantu keluarga besar.

Selain itu, ketergantungan pada tunjangan sebagai komponen utama pendapatan membuat kondisi ekonomi PNS menjadi sangat fluktuatif dan tidak stabil. Ketika tunjangan kinerja bergantung pada kebijakan instansi atau kemampuan fiskal daerah, maka kesejahteraan PNS menjadi sangat kontekstual dan tidak merata. Prabowo (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan ini tidak hanya menciptakan kecemburuan internal antar-PNS, tetapi juga memperdalam jurang antara persepsi publik dan kenyataan yang dialami PNS di instansi dengan tunjangan rendah.Literatur juga mencatat bahwa realitas ekonomi PNS sering kali disamarkan oleh status formal yang melekat pada profesi ini. Meskipun secara administratif PNS memiliki pekerjaan tetap, jaminan pensiun, dan perlindungan hukum, namun secara ekonomi banyak dari mereka hidup dalam kondisi keuangan yang sangat terbatas. Wulandari (2020) secara eksplisit menunjukkan bahwa PNS di daerah tertinggal harus menghadapi beban kerja tinggi dengan fasilitas dan kompensasi yang minim, sehingga menantang asumsi publik tentang kesejahteraan PNS.Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa realitas ekonomi PNS bersifat struktural, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara serta kondisi ekonomi makro. Fakta ini menunjukkan bahwa kesejahteraan PNS tidak dapat disederhanakan sebagai hasil dari status profesi semata, melainkan merupakan produk dari sistem remunerasi yang kompleks dan sering kali tidak adil.

**Kesenjangan antara Persepsi Publik dan Realitas Ekonomi PNS**

Analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten (dikotomi) antara citra PNS mapan dan realitas ekonominya. Kesenjangan ini berdampak pada dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi PNS:

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




a) Tekanan Sosial dan Gaya Hidup: PNS terbebani ekspektasi sosial untuk tampil "mapan," yang memaksa mereka memberikan sumbangan lebih besar atau menjaga penampilan di luar kemampuan ekonomi riil (Putri, 2021). Firmansyah (2021) mencatat banyak PNS terpaksa berutang untuk memenuhi tuntutan gaya hidup ini.
b) Dilema Psikologis: Kesenjangan ini menimbulkan tekanan mental (stres dan kecemasan). PNS merasa malu menceritakan kondisi ekonomi sebenarnya karena khawatir dianggap gagal atau tidak kompeten (Indrawan, 2021).
c) Siklus Ekonomi Sulit: Demi memenuhi tuntutan sosial, PNS golongan rendah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan penampilan, sehingga sulit menabung, berinvestasi, atau bahkan terjerat utang konsumtif (Anggraini, 2023; Indrawan, 2021).
d) Minimnya Literasi Publik: Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya literasi publik mengenai sistem remunerasi ASN. Masyarakat menggeneralisasi kesejahteraan tanpa mengetahui adanya perbedaan signifikan berdasarkan golongan, instansi, dan daerah (Kurniawan, 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan antara persepsi publik dan realitas ekonomi PNS bukanlah fenomena insidental, melainkan pola yang konsisten dan sistemik. Kesenjangan ini tercipta karena persepsi masyarakat bergerak lebih lambat dibandingkan perubahan struktural dalam sistem kesejahteraan PNS. Ketika realitas ekonomi mengalami penyesuaian akibat inflasi, reformasi birokrasi, dan dinamika fiskal, persepsi sosial tetap berpegang pada citra lama yang telah terinternalisasi secara kuat.Kesenjangan ini juga bersifat multidimensional. Tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah sosial dan psikologis. Literatur menunjukkan bahwa PNS sering berada dalam posisi dilematis antara mengungkapkan kondisi ekonomi yang sebenarnya atau mempertahankan citra sosial yang diharapkan masyarakat. Putri (2021) mencatat bahwa tekanan ini membuat banyak PNS memilih untuk menyesuaikan gaya hidup dengan ekspektasi sosial, meskipun hal tersebut berdampak negatif pada kondisi keuangan mereka.

Selain itu, minimnya transparansi informasi publik mengenai sistem penggajian dan tunjangan ASN turut memperlebar kesenjangan ini. Masyarakat cenderung melihat PNS sebagai satu kategori homogen tanpa memahami variasi kesejahteraan di dalamnya. Kurniawan (2024) menegaskan bahwa kurangnya literasi publik tentang struktur remunerasi ASN menyebabkan masyarakat terus mereproduksi persepsi yang keliru dan menyederhanakan realitas ekonomi PNS.Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara persepsi dan realitas bukan hanya masalah kesalahpahaman individu, tetapi merupakan persoalan struktural yang diproduksi oleh interaksi antara konstruksi sosial, kebijakan publik, dan kurangnya diseminasi informasi yang akurat.

## PEMBAHASAN

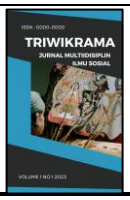
### Mekanisme Pembentukan dan Reproduksi Persepsi Sosial tentang PNS

Persepsi tentang kemapanan PNS adalah realitas sosial yang dikonstruksi. Proses ini melalui tiga tahapan kunci Berger dan Luckmann :

a. Eksternalisasi: Masyarakat mengekspresikan pandangan PNS mapan berdasarkan narasi historis dan simbol birokrasi (seragam, fasilitas).
b. Objektivasi: Pandangan ini menjadi kebenaran umum yang dilembagakan dalam struktur sosial. Masyarakat memperlakukan PNS berdasarkan citra ini, menuntut kontribusi finansial yang lebih besar dalam kegiatan sosial.

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




c. Internalisasi: Individu dan generasi baru menyerap nilai bahwa PNS adalah profesi stabil dan sejahtera, menjadikannya tujuan hidup.

Selain itu, Teori Peran Sosial (Eagly dan Wood, 2012) menjelaskan bahwa masyarakat secara otomatis memberikan seperangkat ekspektasi peran (tampil rapi, mapan) yang harus dipenuhi, terlepas dari kondisi ekonomi individual. Teori Labeling (Howard Becker, 1963) semakin memperkuatnya, di mana label "PNS mapan" menjadi kategori sosial yang membatasi dan menuntut individu dalam kategori tersebut untuk berperilaku sesuai label, mengabaikan fakta empiris. Reproduksi ini diperkuat oleh media sosial (Umar, 2020) yang terus memproduksi konten yang mengukuhkan citra kemapanan.

**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Realitas Ekonomi PNS**

Realitas ekonomi PNS yang kompleks dipengaruhi oleh:

a. Struktur Penggajian Hierarkis: Gaji pokok kaku berdasarkan golongan dan masa kerja (Golongan I-II: Rp 2 juta-Rp 3 juta; Golongan IV: >Rp 6 juta). Perbedaan ini menciptakan kesenjangan gaji pokok yang signifikan.
b. Ketimpangan Tunjangan Kinerja: Tunjangan kinerja antarinstansi sangat timpang, menciptakan kesenjangan kesejahteraan yang ekstrem (Prabowo, 2022).
c. Kapasitas Fiskal Daerah: Tunjangan PNS daerah sangat bergantung pada PAD daerah, menciptakan ketidakadilan struktural antara PNS di daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah tertinggal (Wulandari, 2020).
d. Tingginya Biaya Hidup: Daya beli riil PNS di kota besar sangat rendah karena mahalnya sewa rumah, transportasi, dan kebutuhan pokok. Lestari dan Putra (2023) menunjukkan beban alokasi pengeluaran yang berat di kota metropolitan.
e. Beban Ekonomi Keluarga dan Tuntutan Sosial: Budaya kekeluargaan di Indonesia menjadikan PNS sebagai tempat bergantung finansial. Tuntutan untuk partisipasi sosial (arisan, sumbangan) juga menambah beban pengeluaran (Putri, 2021).
f. Inflasi: Kenaikan harga pangan dan energi (Data BPS, 2023) cepat menggerus daya beli PNS golongan rendah yang memiliki margin ekonomi yang tipis.

**Dampak Dikotomi terhadap Kehidupan PNS**

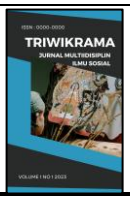
Dikotomi ini berdampak serius dan sistemik:

a. Tekanan Sosial dan Konsumsi Tidak Sehat: PNS terpaksa mempertahankan gaya hidup di luar kemampuan ekonomi, yang berujung pada pola konsumsi tidak sehat dan penggunaan utang konsumtif (KTA/kartu kredit) demi menjaga citra (Firmansyah, 2021; Indrawan, 2021).
b. Stigma Pekerjaan Sampingan: Adanya stigma sosial membuat banyak PNS enggan terang-terangan mencari penghasilan tambahan, yang pada gilirannya menambah beban psikologis mereka (Latif dan Rahmawati, 2019).
c. Dilema dan Stres Psikologis: PNS mengalami tekanan mental karena harus menyembunyikan kesulitan finansial agar tidak dianggap gagal. Hal ini memengaruhi kesehatan mental dan bahkan memicu konflik rumah tangga akibat perbedaan ekspektasi.
d. Kesulitan Mencapai Kesejahteraan Jangka Panjang: Fokus pada pemenuhan tuntutan sosial dan gaya hidup jangka pendek menghambat PNS golongan rendah untuk menabung, berinvestasi, dan membangun cadangan finansial untuk masa depan atau pensiun.

**Implikasi Teoretis dan Praktis**

a. Secara Teoretis : Penelitian ini memperkuat Teori Konstruksi Sosial dengan menunjukkan bagaimana realitas sosial (kemapanan PNS) dapat bertahan meskipun bertentangan dengan

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




fakta empiris. Penelitian ini juga memperkaya Teori Peran Sosial dan Teori Labeling dengan menggarisbawahi bagaimana ekspektasi peran dan label sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menciptakan beban ganda bagi individu dalam birokrasi.

b. Secara Praktis : Temuan ini menuntut adanya transparansi remunerasi dari pemerintah (Kurniawan, 2024) untuk mengurangi kesenjangan informasi publik. Implikasi kebijakan menyoroti perlunya kebijakan kesejahteraan yang lebih adil dan kontekstual bagi PNS golongan rendah, termasuk mengurangi ketimpangan tunjangan kinerja antarinstansi dan mempertimbangkan biaya hidup riil per daerah. Terakhir, pentingnya literasi finansial bagi PNS untuk membangun resistensi terhadap tekanan sosial yang bersifat semu.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

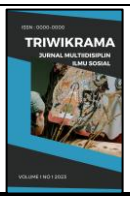
Berdasarkan hasil studi literatur dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dikotomi yang nyata dan signifikan antara persepsi sosial masyarakat tentang kemapanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan realitas ekonomi faktual yang dialami oleh sebagian besar PNS, khususnya pada golongan rendah.

1. Persepsi Kemapanan adalah hasil dari konstruksi sosial yang kuat, diwariskan melalui narasi historis Orde Baru, diperkuat oleh simbol birokrasi, dan direproduksi melalui media. Konstruksi ini diperkokoh oleh Teori Peran Sosial (tuntutan menjadi "abdi negara" yang stabil) dan Teori Labeling (generalisasi label "PNS mapan") yang secara efektif mengabaikan variasi ekonomi individu.
2. Realitas Ekonomi PNS menunjukkan adanya keterbatasan pendapatan, struktur gaji hierarkis yang kaku, ketimpangan tunjangan kinerjaantarinstansi dan antarwilayah (kapasitas fiskal daerah), serta kerentanan terhadap biaya hidup tinggi dan inflasi. Kondisi ini memaksa banyak PNS golongan rendah untuk mencari penghasilan tambahan, yang berlawanan dengan citra sejahtera yang dilekatkan masyarakat.
3. Dikotomiini menciptakan beban sosial, psikologis, dan ekonomiyang signifikan bagi PNS. Mereka tertekan untuk memenuhi ekspektasi gaya hidup dan kontribusi sosial yang tidak didukung oleh kondisi finansial mereka yang sebenarnya, yang berakar dari stereotip yang kuat dan kurangnya literasi publik terhadap struktur remunerasi ASN.

### Saran

1. Edukasi dan Transparansi Publik: Pemerintah, melalui KemenPAN-RB dan BKN, perlu meningkatkan transparansi dan edukasi public secara masif mengenai struktur gaji dan variasi tunjangan kinerja PNS berdasarkan golongan, instansi, dan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi information gap dan melemahkan stereotip "PNS mapan" yang tidak akurat.
2. Pembenahan Kebijakan Remunerasi: Perlu adanya pembenahan kebijakan remunerasi yang lebih berkeadilan. Pemerintah pusat disarankan untuk menyusun skema tunjangan kinerja yang mengurangi ketimpangan ekstrem antarinstansi dan memberikan bobot lebih besar pada penyesuaian gaji pokok/tunjangan di daerah dengan biaya hidup tinggi, khususnya bagi PNS golongan I dan II.
3. Pengembangan Literasi Finansial: Instansi pemerintah perlu menyediakan program literasi finansial dan pelatihan pengelolaan keuangan bagi PNS. Hal ini penting agar PNS memiliki

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com




resistensi terhadap tekanan sosial dan mampu membuat keputusan keuangan yang sehat, alih-alih berutang demi memenuhi tuntutan citra publik.

4. Penelitian Lanjutan: Hasil temuan ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya kajian empiris kualitatif yang berfokus pada pengalaman mikro PNS golongan rendah terkait dampak psikososial dan strategi adaptasi finansial mereka dalam menghadapi dikotomi ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, M. (2023). *Persepsi publik terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik harga konsumen dan inflasi*. Badan Pusat Statistik.

Dewi, R. (2021). *Representasi profesi PNS dalam persepsi publik perkotaan*. Universitas Airlangga.

Eagly, A. H., & Wood, W. (2012). Social role theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology* (pp. 458–476). Sage Publications.

Fadillah, A. (2021). *Persepsi sosial terhadap profesi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Universitas Indonesia

Firmansyah, D. (2021). Persepsi masyarakat terhadap status sosial keluarga PNS. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10*(2), 145–158.

Herlina, S. (2022). *Stereotip dan persepsi publik terhadap PNS: Analisis sosial-budaya*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Indrawan, R. (2021). *Interaksi sosial dan pembentukan persepsi terhadap Aparatur Sipil Negara*. Universitas Diponegoro.

Johansyah, N. (2023). *Tekanan sosial dan psikologis pada ASN di era modern*. Universitas Lambung Mangkurat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara*.

Kurniawan, A. (2024). *Kesenjangan antara persepsi publik dan realitas kesejahteraan PNS*. Universitas Andalas.

Latif, M., & Rahmawati, S. (2019). Kesejahteraan PNS dalam perspektif administrasi publik: Studi di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara, 8*(1), 22–34.

Lestari, W., & Putra, Y. (2023). Analisis daya beli dan kesejahteraan PNS golongan rendah. *Jurnal Ekonomi Publik, 12*(3), 101–119.

Magor, T., Putri, D., & Halim, S. (2024). *Kebijakan remunerasi ASN dan tantangan kesejahteraan*. Pusat Kajian Reformasi Birokrasi Indonesia.

Mandala, F. (2022). *Ketimpangan tunjangan kinerja antara pusat dan daerah: Studi di IPDN*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

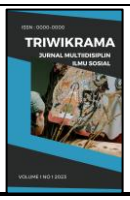
Prabowo, L. (2022). Variasi tunjangan kinerja antar instansi pemerintah: Implikasi terhadap kesejahteraan ASN. *Jurnal Manajemen Publik, 6*(2), 55–70.

Putri, A. (2021). *Gaya hidup dan tekanan sosial dalam profesi ASN*. Universitas Brawijaya.

Rahmawati, D. (2024). *Simbolisme profesi PNS dalam budaya Indonesia*. Universitas Padjadjaran.

Rinaldi, A. (2020). *Reproduksi citra birokrasi dalam reformasi administrasi publik*. Universitas Indonesia.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Setyawan, B. (2023). Reproduksi citra PNS dalam pemberitaan media. *Jurnal Komunikasi Nusantara, 5*(1), 70–83.

Suryadi, I. (2018). *Konstruksi sosial tentang kemapanan PNS dalam masyarakat Jawa* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.

Syahrul, K., & Kibtiyah, F. (2020). Analisis kebijakan tunjangan ASN: Perspektif keadilan dan pemerataan. *Jurnal Kebijakan Publik, 9*(2), 89–104.

Umar, H. (2020). Media sosial dan reproduksi citra profesi PNS. *Jurnal Media dan Masyarakat, 4*(2), 115–127.

Wijaya, R. (2023). *Persepsi kelas menengah terhadap profesi PNS di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

Wulandari, E. (2020). *Beban kerja dan kesejahteraan PNS di daerah tertinggal*. Universitas Nusa Cendana.

*Corresponding author
E-mail addresses: dewimoi202@gmail.com